

HAMBATAN KERJASAMA SISTER CITYKOTA PADANG INDONESIA DAN KOTA FREMANTLE AUSTRALIA

Oleh : Nurul Alfath Syarif

nurulalfathsyrf@gmail.com

Pembimbing : Dra. Den Yealta, M.Phil

Bibliography : 11 Journals, 22 Books, 22Website, 15 Official Documents, 4 Scientific Work

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is the science of international relations that examines the effectiveness of the sister city of Padang City (Indonesia) with the City of Fremantle (Australia). This research aims to explain how the cooperative relationship between the City of Padang and the City of Fremantle, how the effectiveness of the sister city cooperation between the two cities and the obstacles that hinder the cooperation of the sister city.

The study was prepared using the international cooperation by K.J Holsti, constructivism perspective, which is then supported by nation-state analysis level. The methodology using a qualitative method and collecting data using a library research literature.

The results of this study indicate that the sister city collaboration between the City of Padang and the City of Fremantle is less effective. This is evidenced by the absence of outputs and action plans from the collaboration as well as the many obstacles that are obstacles to the proper running of the sister city collaboration.

Keyword : Cooperation, Sister City, Effectiveness, Padang City, The City of Fremantle.

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan riset dalam ilmu hubungan internasional yang mengkaji tentang “Hambatan Kerjasama *Sister City* Kota Padang (Indonesia) dengan Kota Fremantle (Australia)” ditinjau dari kajian isu-isu kontemporer yang merupakan konsentrasi dari penulis. Peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena dalam hubungan internasional mengenai kerjasama antar daerah dengan skala internasional, yang melewati batas teritorial negaranya.

Kota Padang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang merupakan kota pesisir yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera. Posisi kota yang strategis disegi pesisir membuat Kota Padang cukup dikenal dengan potensi pariwisata bahari dan juga pelabuhannya. Di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang merupakan kota yang memiliki penduduk terbanyak. Kota Padang juga menjadi pusat pemerintahan provinsi. Akses yang cukup mudah menjadikan Kota Padang dikenal dan dikunjungi oleh banyak orang, baik secara domestik maupun internasional. Selain itu, Kota Padang sangat terkenal sebagai kota pariwisata di berbagai bidang seperti; wisata alam, wisata bahari, wisata sejarah, wisata budaya, wisata atraksi dan juga wisata kuliner. Beberapa keunggulan yang dimiliki ini membuat Kota Padang cukup dikenal diberbagai daerah bahkan dunia global. Hal ini mengharuskan Kota Padang untuk terus meningkatkan kualitas dan mengembangkan potensi yang ada, salah satunya dengan kerjasama *sister city*.

Sementara itu disisi lain, Kota Fremantle juga memiliki keunggulan tersendiri. Kota Fremantle merupakan kota metropolitan yang terletak di Pantai Barat Australia, di negara bagian *Western Australia*. Kota Fremantle terkenal sebagai kota pelabuhan yang tentunya memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan yang dimiliki oleh Kota Fremantle diantaranya adalah pelabuhan yang sangat maju, destinasi pariwisata yang menakjubkan,

serta tata kota dan infrastuktur yang sangat bagus. Keunggulan-keunggulan inilah yang dirasa patut dicontoh oleh Kota Padang, sehingga terjalinlah kerjasama *sister city* diantara kedua kota ini.

Sebelum Padang-Fremantle menjalin kerjasama *sister city*, hubungan Padang dan Fremantle sebenarnya sudah terjalin sejak 1996. Keduanya telah menjalin hubungan kerja berbentuk *Friendship City* mulai sejak tahun 1996. Namun kembali dipererat seiring perkembangan dan kebutuhan kedua kota. Kerjasama antara dua kota ini terjadi karna beberapa kesamaan dalam berbagai sektor, seperti struktur kota, kesamaan jalur transportasi seperti pelabuhan dan masih banyak faktor lain yang bisa dikembangkan.

Kerjasama *sister city* dapat membantu pemerintah daerah untuk lebih memberikan inovatif serta pemecahan masalah dalam menghadapi berbagai tantangan yang terjadi. Disamping itu, *sister city* juga mempunyai fungsi yang sama dengan *friendship city*, diantaranya yaitu mempromosikan ekonomi lokal, membantu memecahkan permasalahan pembangunan kota, mempromosikan program pendidikan – pengetahuan – budaya – kesehatan – dan sosial, membangun saluran baru untuk komunikasi internasional.¹

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1992, disebutkan bahwa hubungan kerjasama *sister city* adalah hubungan kerjasama kota bersaudara yang dilaksanakan antara pemerintah kota, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota administratif dengan pemerintah kota setingkat di luar negeri.²

¹Yang Long, Chen Xin, Jiang Liu. *The Characteristics and Functions of International Friendship Cities of China— and Prospects of Local Cooperation in Sino-Poland Relations*. Nankai University.

²Reni Windiani . Hubungan Luar Negeri Indonesia Era Otonomi Daerah. *Studi Evaluasi Hubungan Sister Province (Provinsi Kembar) Jawa Tengah Dengan Negara Bagian Queensland Australia*

Hubungan kerjasama dimaksud harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, konstruksi biaya masing-masing pihak, maupun mengenai lamanya waktu yang diperlukan bagi program kegiatan yang dikerjasamakan.

Prinsip kerjasama antar daerah kota, adalah harus didasarkan pada beberapa prinsip yang telah dicantumkan dalam PP No. 50 Tahun 2007, pasal 2, yaitu: Efisiensi, efektivitas (keefektifan), sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

Kerjasama *sister city* dilaksanakan sesuai dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Pada pasal 2, berbunyi Kerjasama Daerah dilakukan dengan prinsip:

- 1) Efisiensi
- 2) efektivitas (keefektifan)
- 3) sinergi
- 4) saling menguntungkan
- 5) kesepakatan bersama
- 6) itikad baik
- 7) mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 8) persamaan kedudukan
- 9) transparansi
- 10) keadilan
- 11) kepastian hukum.

KERANGKA TEORI

a. Perspektif: Pluralisme

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif pluralisme. Pluralisme adalah perspektif yang terdapat dalam hubungan internasional yang berkembang dengan pesat. Pluralisme

beranggapan bahwa hubungan internasional tidak hanya sebatas pada Negara saja, tetapi juga hubungan antar individu dan kelompok yang negara tidak selalu menjadi aktor utama.³

b. Tingkat Analisa: Negara-Bangsa

Tingkat analisa yang penulis gunakan yaitu tingkat analisa *nation-state* (Negara bangsa), yang mana penulis dapat menganalisis bahwa ada indikator-indikator yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara seperti faktor budaya, sejarah, agama, sosial, ekonomi, geografi, demografi, dan sebagainya. Pada penulisan ini level analisa yang dimaksud adalah negara Indonesia dan negara Australia.

Teori Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional adalah kerjasama yang dilakukan untuk mendukung perjuangan melawan segala bentuk pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan.⁴ Kerjasama internasional juga dapat mengatasi segala bentuk agresi atau ancaman kedaulatan nasional, persatuan nasional atau integrasi teritorial, dan penolakan terhadap hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan hak setiap orang untuk melaksanakan kedaulatan sepenuhnya atas kekayaan dan sumber daya nasional.⁵ Kerjasama internasional secara sederhana dapat diartikan sebagai hubungan yang terjalin antara dua negara atau lebih.⁶

Kerjasama internasional adalah kerjasama yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing bangsa, untuk bantu membantu, mengatur batas-batas kekuasaan suatu

³Dori Gusman dan Tri Joko Waluyo, "Peran Greenpeace dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan", *Jurnal Transnasional* Vol. 6 No. 2, (Februari, 2015): hal 3.

⁴Y. Sri. T.D Haryo Tamtomo Dkk. IPS Terpadu Untuk SMP dan MTS Kelas IX Semester 2. 2007. hal. 109

⁵ Yusuf Sufri. Hubungan Internasional an Politik Luar Negeri. 1989. hal. 122

⁶J. Frankel, Op. Cit. hal 102.

bangsa, tukar menukar utusan dan lain sebagainya. Kerjasama itu meliputi hubungan diplomatik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan lain-lain. pelaksanaan kerjasama ini ada yang diorganisir oleh PBB, kerjasama antar pemerintah seperti IGGI adapula berdasarkan perjanjian antar suatu negara dengan negara lain (perjanjian bilateral) seperti perjanjian kerjasama *sister city*⁷ Jadi kerjasama Internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh setiap negara untuk membangun hubungan antar negara yang bertujuan untuk saling membantu dalam segala aspek kehidupan. Kerjasama *sister city* antara Kota Padang dan Fremantle adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan kedua negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Padang dan Kota Fremantle

Kota Padang merupakan ibukota dari provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan PP No.17 tahun 1980, luas wilayah Kota Padang secara administratif adalah 165,35 Km. Menurut Perda No. 10 Tahun 2005 tentang luas Kota Padang diketahui terjadi penambahan luas administrasi menjadi 1.414,96 Km², dimana penambahan wilayah laut/perairan seluas 720,00 km².⁸ Secara astronomis, Kota Padang berada di antara 00 44' 00" dan 1 08' 35" Lintang Selatan serta antara 100 05' 05" dan 100 34' 09" Bujur Timur.⁹

Kota Fremantle merupakan sebuah kota tua yang mulai berdetak sejak April 1829 saat Kapten James Stirling membuang sauh dari kapal HMS

Challenger di lepas pantai Australia Barat, tak jauh dari mulut Sungai Swan. Sedikit cerita menarik dibalik Fremantle, awalnya, Kapten Stirling mempersempit wilayah Koloni Sungai Swan (Swan River Colony) ini untuk Raja Inggris pada saat itu, Raja George IV yang kemudian menamai wilayah ini dengan nama kapten kapal HMS Challenger, Kapten Fremantle.

Hubungan Kerjasama Kota Padang dan Fremantle

Kesepakatan kerjasama *sister city* antara Kota Padang dan Kota Fremantle tentunya tidak terjadi begitu saja. Jauh sebelum kedua pihak menyepakati untuk menjalin hubungan kerjasama *sister city*, keduanya juga sudah berhubungan dalam bentuk *friendship city* sejak tahun 1996. Namun kerjasama *friendship city* antara kedua pihak tersebut kurang terlihat dan kurang terasa dikalangan masyarakat dan pemerintahan. Sebelum disepakatinya kerjasama *sister city* antara Kota Padang dan Kota Fremantle, kedua kota tersebut sudah saling mengunjungi satu sama lain untuk menyelaraskan berbagai kepentingan.

Kunjungan pertama bertemunya kedua pihak yaitu ketika adanya Konferensi Tingkat Tinggi IORA yang merupakan rangkaian acara dari *15th Council of Ministers and Its Related Meetings*, pada 20 – 23 Oktober 2015. *Indian Ocean Rim Association* (IORA) adalah pelopor dan satu-satunya organisasi regional di wilayah Samudera Hindia.

Awal mula adanya rencana peningkatan kerjasama *friendship city* antara Kota Padang dan Kota Fremantle terbesit pada kunjungan ini. Pada 11 November 2016, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mendapat kehormatan diundang pada acara Indonesia Business Summit di Perth Convention & Exhibition Centre, Perth,

⁷Mochtar Mas' oed. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. Hal. 34

⁸Peraturan Daerah Kota Padang No. 10 Tahun 2005

⁹Pemerintah Kota Padang.
<https://www.padang.go.id/sejarah-kota-padang> (diakses pada 10 Februari 2019 pukul 09.48)

Australia.¹⁰ Kepala Badan Penanaman Modal, dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Padang, Drs. Didi Aryadi, M.Si mengatakan, kegiatan tersebut digagas oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia. Pada acara tersebut, panitia dari KBRI mengundang pengusaha dari Indonesia dan Australia, beberapa orang gubernur, bupati dan walikota.¹¹

Menurut penjelasan Didi, ketika rombongan Walikota Padang mengunjungi Walikota Fremantle DR Brad Pettit. Ia menyambut dengan hangat Walikota Padang dan rombongan. Dan pada saat diundang Walikota Mahyeldi ke Padang untuk menghadiri hari jadi Kota Padang 7 Agustus 2017, ia malah menyatakan sudah sangat ingin ke Padang. Pak Wali berkeinginan, semua walikota yang menjalin kerjasama Sister City dengan Kota Padang diundang pada HUT Kota Padang, 7 Agustus 2017, termasuk Walikota Fremantle. Tapi Walikota Brad Pettit malah minta di Januari 2017. Akhirnya disepakati, kunjungan DR Brad Pettit ke Kota Padang dijadwalkan Januari 2017. Pada kunjungan itu nantinya, Wako Brad Pettit akan membawa serta AIA, Kailis Group, Fremantle Port, Deni Hilman, dan pengusaha Australia lainnya. Seperti yang diketahui bahwa kota Fremantle sudah 20 tahun menjalin hubungan Friendship City dengan Kota Padang saat itu. Selama di Padang nantinya, mereka nantinya akan melihat lokasi yang memungkinkan untuk berinvestasi dan menandatangani MoU peningkatan hubungan menjadi Sister City.

Pertemuan selanjutnya antar pihak pemerintah Kota Padang dan Kota Fremantle dijadwalkan berlangsung pada bulan Mei 2017. Namun sebelum pertemuan itu berlangsung, KJRI Perth

¹⁰Inilah Hasil Kunjungan Walikota Padang ke Perth Australia

<https://www.bentengsumbar.com/2016/11/inilah-hasil-kunjungan-walikota-padang.html>

¹¹*Ibid.*

melakukan pertemuan dengan Premier Negara Bagian Australia Barat, Mark McGowan di kantor Premier di Perth pada 26 April 2017.¹² McGowan memiliki ketertarikan untuk mengembangkan lebih jauh hubungan antara Australia Barat dengan negara-negara di kawasan Asia terutama dengan Indonesia. Pada pertemuan itu kedua pihak berencana untuk lebih meningkatkan hubungan melalui keberadaannya yang akan dirintis antara Kota Pelabuhan Fremantle dengan Padang. Dalam kaitan ini, delegasi Walikota Fremantle akan berkunjung ke Padang pada bulan Mei 2017 untuk meresmikan pembentukan kotakembar tersebut.

Selanjutnya, Walikota Fremantle akhirnya berkunjung ke Kota Padang pada tanggal 1-5 Mei 2017. Walikota Fremantle tersebut, DR Brad Pettit dinobatkan sebagai tamu kehormatan saat berkunjung ke Padang.¹³ Alasan diberikannya penghargaan itu tak lain karena Walikota Fremantle telah mampu menjaga hubungan baik kedua kota. Bahkan, Walikota Fremantle sudah mengingatkan kembali hubungan baik kedua kota tersebut.

Di hari selanjutnya, Walikota Fremantle, Brad Pettit beserta rombongan mengunjungi PT. Semen Padang. Kunjungan tersebut merupakan rangkaian dari kunjungan untuk lebih mengenal Kota Padang lebih jauh setelah kerjasama Friendship City yang sudah terjalin sejak 21 tahun lalu. Terkait Semen Padang, Brad Pettit berharap ekspor Semen Padang bisa semakin meningkat ke Australia, dengan jarak yang lebih dekat. Selain itu, salah satu kerjasama yang lebih riil yang bisa

¹²KJRI Perth. Courtesy Call Konjen RI Perth dengan Premier Australia Barat, Hon Mark McGowan MLA <http://kji-perth.org.au/index.php/2017/04/27/they-are-talking-about-indonesia/>

¹³Dinobatkan Tamu Kehormatan, Walikota Fremantle Australia Saat Berkunjung Di Kota Padang <http://www.mediawawasan.com/2017/05/dinobatkan-tamu-kehormatan-walikota.html>

diwujudkan adalah, perumahan murah yang selama ini tidak hanya menjadi masalah bagi Indonesia tapi juga Australia, dan semua negara. Dalam hal ini, Semen Padang bisa bekerjasama untuk mencari produk tepat untuk mendukung program ini.¹⁴

Tahapan Kerjasama *Sister city* Antara Kota Padang dan Fremantle

Kerjasama *sister city* Kota Padang dengan Kota Fremantle dilakukan karena tiga hal yaitu lingkungan internal, lingkungan eksternal, dan kepentingan. Lingkungan internal yang dimaksudkan yaitu kondisi bidang budaya dan pariwisata, pendidikan, infrastruktur, transportasi, perdagangan Kota Padang karena Kota Padang. Kemudian kondisi Lingkungan eksternal yaitu Kondisi budaya dan pariwisata, pendidikan, infrastruktur, transportasi, perdagangan Kota Fremantle yang dianggap lebih maju. Hal lainnya yaitu kepentingan yang dimaksudkan pada hal ini adalah keinginan kota padang untuk mengembangkan bidang budaya dan pariwisata, pendidikan, infrastruktur, transportasi, perdagangan.

Bagi Kota Padang dan Kota Fremantle, kerjasama *sister city* ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Kesempatan untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerjakasikan.
2. Mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah kota, masyarakat dan swasta.
3. Mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak.
4. Kesempatan untuk tukar menukar kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah.

Sehingga prinsip dasar dari skema *sister city* ini harus memberikan manfaat

dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bekerja sama. Atas dasar tujuan yang ingin dicapai maka Pemerintah Kota Padang memutuskan untuk melakukan kerjasama *sister city* tentunya atas persetujuan pemerintah pusat.

Masa Penjajakan

Masa penjajakan kerjasama *sister city* Kota Padang dan Kota Fremantle dimulai tahun 2015-2017. Perencanaan akan dilakukannya kerjasama tersebut dimulai saat adanya pertemuan Indian Ocean Local Government Forum (Indonesia-IOLGF), di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Pertemuan IOLGF ini bertujuan agar dapat memperkuat kerjasama antar-daerah sebelum Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association (KTT IORA) yang waktu itu akan digelar di Padang, 20-23 Oktober 2015. Jadi secara tidak langsung, pertemuan IOLGF dan IORA merupakan landasan munculnya gagasan untuk melakukan kerjasama antara Kota Padang dan Kota Fremantle.

Pada masa-masa penjajakan kerjasama ini, tentu kedua pemerintah kota tersebut memantau satu sama lain, sektor apa yang bisa dijadikan prioritas dalam kerjasama *sister city* ini. Beberapa kesamaan karakteristik dianggap dapat membentuk kerjasama yang akan menguntungkan kedua daerah. Namun jauh sebelum pertemuan itu, Kota Padang dan Kota Fremantle sebenarnya sudah melakukan kerjasama *friendship city* sejak 1996. Pada 2017 kedua pemerintah kota ini (diprakarsai oleh pemerintah Kota Padang) berinisiatif untuk mempererat kerjasama tersebut menjadi *sister city*, seiring perkembangan dan kebutuhan kedua kota. Kerjasama antara dua kota ini terjadi karna beberapa kesamaan dalam berbagai sektor, seperti struktur kota, kesamaan jalur transportasi seperti pelabuhan dan masih banyak faktor lain yang bisa dikembangkan.

¹⁴Walikota Fremantle Australia Kunjungi Semen Padang
<http://www.semenpadang.co.id/?mod=berita&kat=&id=1451>

Sebagai langkah meningkatkan dan mengembangkan hubungan Indonesia dan Australia terutama Australia Barat, KJRI Perth terus berupaya mendorong dan memfasilitasi interaksi maupun kerja sama antara kota-kota di Indonesia dengan kota-kota di Australia Barat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh KJRI Perth adalah memfasilitasi keinginan Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kota Fremantle, Australia Barat untuk mempererat dan meningkatkan hubungan kedua kota tersebut. Upaya itu dimulai oleh KJRI Perth pada awal tahun 2017.

Penyusunan dan penandatanganan LoI

Mekanisme Pengambilan keputusan dari proses kerjasama *sister city* sesuai Permenlu no. 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Mekanisme Hubungan Kerjasama Luar Negeri oleh Daerah) berdasarkan data Pemerintah Wali Kota Padang matrik kronologis peninjauan kerjasama *Sister city* Kota Padang dengan Kota Fremantle yaitu Pemerintah Kota Padang merencanakan dan meminta persetujuan DPRD, setelah DPRD menyetujui Pemerintah Kota Padang meminta persetujuan Kementerian Dalam Negeri kemudian Kementerian dalam negeri mengadakan rapat dan jika disetujui Kementerian Dalam Negeri melaporkan kepada Sekretaris Negara.¹⁵

Setelah pemerintah Kota Padang yang ingin bekerjasama dengan Fremantle memberitahukan kepada Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri dan instansi terkait untuk mendapat pertimbangan, kemudian Pemerintah Kota Padang bersama dengan Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI di luar negeri mengadakan peninjauan untuk mengetahui apakah minatnya tersebut mendapat tanggapan positif dari pemerintah Kota/Provinsi di luar negeri. Tanggapan positif itu didapatkan oleh pemerintah Kota Padang pada saat pemerintah Kota Padang berkunjung ke

Fremantle dalam rangkaian acara Indonesia Business Summit di Perth Convention & Exhibition Centre, Perth, Australia. Maka pada saat itu kedua Pemerintah Daerah, menyetujui dan berinisiatif untuk meningkatkan kerjasama lebih lanjut. Maka dipersiapkanlah penandatanganan kesepakatan awal dalam bentuk pernyataan kehendak atau Letter of Intent (LoI).

Letter of Intent (LoI) adalah ikatan secara hukum sebagai komitmen kedua daerah untuk melakukan hubungan bilateral. LoI tersebut disiapkan oleh Pemerintah Kota Padang dan Departemen Luar Negeri atau Perwakilan RI di luar negeri untuk disampaikan dan dimintakan tanggapan kepada mitra asing di luar negeri. LoI ini merupakan pengikat kerjasama pertama kali antara kedua daerah. Naskah LoI yang disepakati bersama dapat ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat setingkat dari kedua Pemerintah Daerah.

LoI kerjasama *sister city* antara Kota Padang dan Kota Fremantle ditandatangani pada tanggal 3 Mei 2017 oleh Walikota Padang Mahyeldi dan Walikota Fremantle Brad Pettitt. Penandatanganan tersebut juga disaksikan oleh sekitar 250 peserta yang menghadiri seminar dan rapat kerja III Indian Ocean Local Government Forum (IOLGF) Indonesia yang diantaranya adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, pejabat dari berbagai Pemerintah Kota dan Kabupaten, Universitas, dan Sekolah Menengah.

Pemerintah Kota Padang dan Kota Fremantle menyatakan "...berkeinginan untuk meningkatkan hubungan yang harmonis dan kerjasama antara kedua kota; dengan memperhatikan asas kesetaraan dan manfaat, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara..." Dalam pernyataan kehendak ini, bidang-bidang yang akan menjadi fokus kerjasama adalah bidang:

1. Perdagangan dan Jasa

¹⁵Permenlu no. 09/A/KP/ XII/2006/01

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
3. Pariwisata dan Kebudayaan
4. Perencanaan dan Infrastruktur.

Sebagai tindak lanjut dari LoI, kedua pihak dapat bersepakat untuk melembagakan kerjasama dengan Memorandum of Understanding (MoU). Pembuatan MoU merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional dilakukan menurut mekanisme. Rancangan naskah MoU dapat memuat bidang kerjasama sebagaimana dengan memperhatikan pula aturan tentang pemberian visa, ijin tinggal, perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring berjalannya kerjasama *sister city* Kota Padang dan Kota Fremantle, Dewan Bisnis Diaspora Indonesia (IDBC) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memfasilitasi peningkatan kerja sama provinsi/kota bersaudara (*sister city*) antara pemerintah daerah Indonesia dan Australia. Acara ini dilakukan di ruang rapat Gedung F Kemendagri, Jakarta, Rabu tanggal 1 Agustus 2018.¹⁶

Bentuk-bentuk Hambatan dalam Kerjasama *Sister City* Kota Padang dengan Kota Fremantle

Kerjasama yang dilakukan meliputi bidang perdagangan dan jasa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pariwisata dan kebudayaan, perencanaan dan infrastruktur ini terkesan tidak berjalan sebagaimana semestinya atau berhenti begitu saja. Bahkan rencana aksi dari

kerjasama *sister city* ini pun belum ada.¹⁷ Jangka waktu kerjasama ini yaitu 3 (tiga) tahun dan secara otomatis berlanjut untuk 3 (tiga) tahun berikutnya, kecuali apabila terjadi pemutusan secara tertulis oleh salah satu pihak dalam waktu 6 (enam) bulan sebelumnya. Namun hingga saat ini, kerjasama yang sudah memasuki tahun ketiganya ini masih belum terlihat hasilnya.

Dilihat dari ukuran efektivitas kerjasama *sister city* ini maka kerjasama *sister city* ini tergolong belum efektif, hal tersebut dikarenakan belum semua yang disepakati berjalan dengan efektif. Hal tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam hambatan yang terjadi dalam kerjasama tersebut. Bentuk-bentuk hambatan dalam pelaksanaan kesepakatan LoI kerjasama *sister city* diantaranya:

1. Kerjasama *sister city* antara Kota Padang (Indonesia) dengan Kota Fremantle (Australia) tidak berjalan. Sejak 2 tahun yang lalu LoI kerjasama disepakati oleh kedua pihak, hingga saat ini belum ada hasil nyata yang terlihat sebagai *output* dari kerjasama tersebut. Kerjasama *sister city* ini terkesan berjalan ditempat dan tidak ada progresnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Biro Kerjasama Pemerintah Kota Padang, Bapak Erwin M, beliau mengatakan:

“Kerjasama ini terkesan mati suri, tidak berjalan sama sekali. Kerjasama yang seharusnya diharapkan sudah menghasilkan output yang baik bagi kedua pihak, namun hingga saat ini belum terlihat hasil apa-apa. Bahkan action plan pun belum ada. Bahkan tahap lanjut mengenai kerjasama sister city ini, yaitu penandatanganan MOU antara kedua pihak

¹⁶Diaspora Indonesia-Kemendagri tandatangani nota kesepahaman kotakembar https://makassar.antaranews.com/nasional/berita/732299/diaspora-indonesia-kemendagri-tandatangani-nota-kesepahaman-kota-kembar?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Erwin M, Kepala Bagian Biro Kerjasama Pemerintah Kota Padang pada 10 Januari 2019.

masih juga belum terlaksana. Pada Desember 2018 lalu, pihak pemerintah Kota Padang sudah berusaha untuk menghubungi kembali pihak pemerintah Kota Fremantle, terkait penjadwalan penandatanganan MoU kerjasama *sister city* tersebut via email. Namun tanggapan dari pihak Fremantle dirasa sangat lambat. Kemudian setelah bisa berkoordinasi, direncanakan penandatanganan MoU tersebut akan dilaksanakan pada akhir Maret atau awal bulan April 2019, yang mana pemerintah Kota Padang yang akan berkunjung ke Fremantle. Doakan saja bisa terlaksana ya.”¹⁸

Namun pada kenyataannya hingga saat ini, bulan Agustus 2019, penandatanganan MoU tersebut masih saja belum terlaksana.

Kurangnya respon dari pemerintah Kota Fremantle. Pemerintah kota Padang menilai bahwa tanggapan dari pihak Kota Fremantle lambat dan terkesan ‘cuek’ dengan kelanjutan kerjasama *sister city* ini. Padahal hingga saat ini, kerjasama *sister city* ini sudah mulai memasuki tahun ketiga. Contohnya saja ketika pemerintah Kota Padang menginginkan kelanjutan kerjasama tersebut yaitu seperti penandatanganan MoU serta perancangan *action plan*, pemerintah Fremantle kurang merespon dengan baik mengenai ajakan tersebut.

2. Pihak Fremantle menginginkan adanya pihak ketiga untuk memfasilitasi kerjasama tersebut. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Kota Fremantle

lebih mempercayai perihal kerjasama ini jika ada pihak ketiga. Adapun pihak ketiga yang ditunjuk untuk memfasilitasi kerjasama *sister city* ini yaitu Dewan Bisnis Diaspora Indonesia (IDBC) yang diwakili oleh Astrid Vasile yang menjabat sebagai Direktur Regional IDBC Australia. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Erwin:

“Pihak Fremantle menginginkan adanya pihak ketiga dalam kerjasama ini, yaitu Bu Astrid. Mereka merasa lebih mempercayai kerjasama ini jika ada campur tangan beliau, karna pihak Fremantle sudah lama kenal dan bekerjasama dengan Bu Astrid.”

Maka dari itu kerjasama *sister city* ini terasa kurang berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Dewan Bisnis Diaspora Indonesia (IDBC) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) guna memfasilitasi peningkatan kerja sama provinsi/kota kembar (*sister city*) antara pemerintah daerah di Indonesia dan Australia. IDBC telah berperan aktif dalam mendekatkan hubungan antara Padang dan Fremantle (Australia) dengan memfasilitasi berbagai pertemuan antara kedua walikota.

Penandatanganan MoU antara Direktur Regional IDBC Australia Astrid Vasile dan Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama Setjen Kemendagri Nelson Simanjuntak berlangsung di Jakarta, Rabu, 1 Agustus 2018.¹⁹ MoU tersebut berfungsi sebagai landasan IDBC dan Kemendagri untuk membantu daerah dalam merinci potensi kerja sama yang dapat bermanfaat bagi kedua daerah yang sepakat menjalin kerja sama kota kembar. Dengan

¹⁹Op. Cit. Diaspora Indonesia-
Kemendagri Tandatangani
Nota Kesepahaman Kota Kembar

¹⁸Ibid.

ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama sister city/sister province secara lebih terarah di bawah koordinasi Setjen Kementerian Dalam Negeri.

Pada saat penandatanganan MoU tersebut, Astrid menjelaskan peningkatan kerja sama kota kembar antara pemerintah daerah di Indonesia dan Australia akan menguntungkan kedua daerah. Selain mendekatkan penduduk dari dua daerah yang berbeda, sister city mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di kedua daerah sehingga dapat pula menciptakan lapangan kerja. Program kota kembar juga dapat memudahkan masyarakat kedua daerah mencari mitra bisnis yang ideal serta membuka peluang bisnis dan investasi bagi para pelaku usaha yang ingin merambah pasar baru.²⁰

3. KJRI Perth dinilai kurang merespon permintaan dari pemerintah Kota Padang untuk menjadi fasilitator untuk melanjutkan kerjasama ini. Sebagai fasilitator KJRI Perth terus berupaya mendorong dan memfasilitasi interaksi maupun kerja sama antara kota-kota di Indonesia dengan kota-kota di Australia Barat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh KJRI Perth yaitu memfasilitasi keinginan Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kota Freemantle, Australia Barat untuk mempererat dan meningkatkan hubungan kedua kota tersebut.

4. Pemerintah Kota Padang kurang meninjau kelanjutan kerjasama *sister city* antara kedua kota ini. Pemerintah Kota Padang terkesan 'mau tak mau' dan kurang memprioritaskan kerjasama *sister city* ini.

5. Terbatasnya anggaran dan Pemerintah Kota Padang. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pihak pemerintah Kota Fremantle dirasa kurang responsif dalam kerjasama ini, maka pemerintah Kota Padang dirasa perlu

untuk menindaklanjuti langsung hal tersebut. Namun karna keterbatasan anggaran tersebut membuat Pemerintah Kota Padang tidak bisa untuk secara langsung (berkunjung) berhubungan dengan pihak pemerintah Kota Fremantle.

6. Kurangnya dukungan dari pemerintah pusat. Dukungan yang dimaksud disini yaitu kehadiran pemerintah pusat seperti Kemenlu dan Kemendagri sebagai fasilitator penghubung kedua pihak terkait. Pemerintah pusat terkesan kurang memberikan dukungan untuk keberlangsungan kerjasama tersebut.

7. Tidak adanya arsip dan dokumentasi kerjasama sejak kerjasama *friendship city* 23 tahun lalu. Salah satu alasan Kota Padang dan Kota Fremantle meningkatkan taraf kerjasama yang sebelumnya hanya kerjasama *friendship city* menjadi kerjasama *sister city*, yaitu karena kerjasama yang sebelumnya dirasa belum maksimal. Hal itu dikarenakan pada saat itu belum ada biro kerjasama yang mengurus perihal kerjasama tersebut.

Kepala Bagian Biro Kerjasama Pemerintah Kota Padang, Bapak Erwin M, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab terkendalanya kerjasama *sister city* antara Kota Padang dan Kota Fremantle yaitu tidak adanya arsip maupun dokumentasi pertemuan yang terlaksana sejak dahulu kerjasama *friendship city* dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan dahulunya belum ada biro kerjasama yang mengurus mengenai kearsipan dan dokumentasi tersebut. Padahal pada kenyataannya, selama kerjasama tersebut terjalin sudah banyak kunjungan yang terlaksana, seperti pelatihan guru dari Padang ke Fremantle.²¹

8. *Political will* maupun produk hukum yang dibuat oleh kepala daerah dan DPRD yang tidak sejalan dengan semangat kerjasama daerah.²² *Political Will* atau

²⁰*Ibid.*

²¹Hasil wawancara dengan Bapak Erwin M. Op, Cit.

²²Eka Ttiyani A. Efektivitas Kerjasama Sister City Kota Semarang (Indonesia) dengan Brisbane

keinginan politik yang diartikan sebagai "niatan pimpinan" untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kebaikan bersama dalam jangka panjang. Keinginan politik (Political will) juga diartikan apabila negara mempunyai kemauan, tetapi tentunya harus didukung oleh rakyat. Brinkerhoff (2010) memberikan pengertian secara teoritis, political will adalah kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha berkelanjutan. Menurut Brinkerhoff (1999), ada beberapa indikator untuk mengukur political will pemerintah, yaitu inisiatif pemerintah, prioritas, mobilisasi dukungan politik, penegakan hukum dan keberlanjutan usaha. Political Will diartikan sebagai "niatan pimpinan" untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kebaikan bersama dalam jangka panjang. Terdapat beberapa indikator untuk mengukur political will, yaitu inisiatif, prioritas, mobilisasi dukungan politik, penegakan hukum dan keberlanjutan usaha.

9. Tidak adanya simbol yang melambangkan adanya kerjasama antara kedua kota beda negara tersebut. Sejak kerjasama *friendship city* berlangsung hingga meningkat ke kerjasama *sister city* seperti saat ini, belum ada simbol yang memperlihatkan kerjasama kedua kota tersebut terjalin, seperti tugu ataupun yang lain. Hal tersebut berakibat pada kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar mengenai kerjasama yang terjalin antara kedua kota yang sudah memasuki tahun ke 23 ini. Efek dari kerjasama tersebut dinilai kurang dirasakan oleh penduduk Kota Padang, baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintahan.

Mengatasi kebuntuan akan pelaksanaan kerjasama daerah, maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) 50/2007 memberikan acuan jelas

mengenai pelaksanaan kerjasama daerah yakni sebagai berikut.²³

1. Kerjasama daerah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerjasama.
2. Salah satu kepala daerah dapat memprakarsai kerjasama dan selanjutnya membuat sebuah rancangan perjanjian kerjasama yang memuat antara lain: subjek kerjasama, objek kerja sama, ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerjasama, pengakhiran kerjasama, keadaan memaksa dan penyelesaian perselisihan.
3. Rencana kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD apabila biaya belum teranggarkan dalam APBD tahun berjalan.
4. Kerjasama daerah yang dilakukan dalam satu propinsi terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah
5. Kerjasama daerah tidak berakhir karena pergantian kepala daerah, artinya bahwa kerjasama daerah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerjasama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian kepala daerah.
6. Masing-masing kepala daerah yang terkait dapat membentuk Badan Kerjasama daerah secara bersama dalam hal membantu kepala daerah melaksanakan kerjasama daerah yang membutuhkan waktu paling sedikit lima tahun, dengan pembiayaan ditanggung bersama sesuai perjanjian kerjasama. Namun Badan kerjasama bukan termasuk perangkat daerah atau di luar SOTK Pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Kerjasama yang dilaksanakan oleh kedua kota meliputi beberapa parua lingkup kerjasama yang disepakati dalam LoI. Dalam pernyataan kehendak ini, bidang-bidang yang akan menjadi fokus kerjasama adalah bidang:

(Australia) Tahun 2002-2007, *JOM FISIP Volume 1 No.2 – Oktober 2014*

²³Peraturan Pemerintah (PP) 50/2007

- Perdagangan dan Jasa
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- Pariwisata dan Kebudayaan
- Perencanaan dan Infrastruktur.

Namun hingga memasuki tahun ketiga dalam kerjasama *sister city* ini, hasil dari bidang kerjasama yang telah disepakati tersebut belum terlihat. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan kerjasama *Sister City* antara Kota Padang dengan Kota Fremantle belum efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya *output* maupun *action plan* dari kerjasama tersebut serta banyaknya hambatan-hambatan yang menjadi penghalang berjalannya kerjasama *sister city* tersebut dengan sebagaimana mestinya.

Referensi:

Jurnal

- Andani Gita Ramadanti, *Kebijakan Travel Warning Australia Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Kunjungan Wisatawan Australia Di Bali Periode 2002-2015*. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6 (2). pp. 147-157. ISSN 2302-8777 (Universitas Airlangga 2017)
- Ayu Lestari Yulia Fitri. Implementasi Pemerintah Kota Bukittinggi Dalam Kerjasama Sister City Dengan Perbandaran Seremban. *JOM FISIP* Volume 3 No. 2 Oktober 2016
- Dori Gusman dan Tri Joko Waluyo, "Peran Greenpeace dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan", *Jurnal Transnasional* Vol. 6 No. 2, (Februari, 2015)
- Eka Ttiyani A. Efektivitas Kerjasama Sister City Kota Semarang (Indonesia) dengan Brisbane (Australia) Tahun 2002-2007, *JOM FISIP Volume 1 No.2 – Oktober 2014*
- Irvan Dwi Rohmawan. Skripsi, *Kebijakan Politik Australia : Analisis Terhadap Peranan Australia dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia (1945-1949)*. Yogyakarta : *FISE*, 2010
- M. Saeri, "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik", *Jurnal Transnasional* Vol. 3 No. 2, (Februari, 2012)
- Nurhaidah, M. Insyah Musa, "Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia", *Jurnal Pesona Dasar* Vol. 3 No. 3, (April, 2015)
- Nurul Isnaeni, "Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Global & Strategis*, 2013
- Rumengan, J., "Perspektif Hukum dan Ekonomi atas Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 6, No.2, (2009).
- Reni Windiani . *Hubungan Luar Negeri Indonesia Era Otonomi Daerah. Studi Evaluasi Hubungan Sister Province (Provinsi Kembar) Jawa Tengah Dengan Negara Bagian Queensland Australia Periode Tahun 2000– 2007*. E-Journal Universitas Diponegoro. 2013
- Safitri Wulansari, "Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Sister City Jakarta-Beijing di Bidang Pariwisata Tahun 2009-2015", *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* Vol. 5 No.4, (Oktober, 2017)
- Singer dalam Yessi Olivia, "Level Analisa Sistem dan Teori Hubungan Internasional", *Jurnal Transnasional* Vol. 5 No. 1, (April, 2013)

Buku

- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994)

- Australian Bureau of Statistics, Census of Population and Housing, 2016. Australian Bureau of Statistics, Census of Population and Housing 2011 and 2016. Compiled and presented in profile.id by .id, the population experts.
- BPS Kota Padang. *Kota Padang Dalam Angka 2018*.
- Brilianawati, Rizky Cahya. Latar Belakang Indonesia Dalam Kerjasama Keselamatan Bidang Maritim Dengan Australian Maritime Safety Authority (Amsa) Periode 2005-2015, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2018.
- Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial-Budaya Kementerian Luar Negeri, *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah Revisi Tahun 2006*, (Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial-Budaya Kementerian Luar Negeri, 2012)
- Frankel, J. *Hubungan Internasional*. (Jakarta: Sungguh Bersaudara, 1980)
- Haris, Abdul. Kasubdit Pertanahan - Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas. *Pengaruh Penatagunaan Tanah Terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi*
- Holsti, KJ. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Teoritis*. (Binacipta, 1995)
- Kantor Penerangan Kedutaan Besar, Ikhtisar Hubungan-Australia Indonesia, Jakarta : Kedutaan Besar Australia, 1973.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Panduan Umum Tata Cara kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah; Revisi Tahun 2006*.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. (Jakarta: Alumni, 2003)
- Marbun, B. N. *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002)
- Mas'ood, Mochtar. *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. 1994. Pustaka belajar: Yogyakarta.
- Neil, 1988. *Infrastructure Engineering And Management*. John Wiley and Sons. Kebijakan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung)
- Oetomo, Andi. *Pengelolaan Perkotaan Lewat Skema Sister City*.
- Oetomo, Andi. *Apa Itu Sister City? (Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan dan Pembangunan* Grigg, Asuka Ogawa. 2012. *Sister City as A Preservation Strategy. Graduate School of Architecture, Planning and Preservation. Columbia University*.
- O. Sinaga. *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik: Implementasi kerjasama internasional* (Bandung: Lepsindo, 2010)
- Sherly, Aktivani. 2017. *Kota Padang Dalam Angka Padang Municipality in Figure 2017*. Padang: BPS Kota Padang
- Sapuan, KE. Skripsi, Strategi Pemerintah Indonesia Menggunakan Gastrodiplomacy Terhadap Australia (2004-2014), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Soekanto, Integrasi : *Kebulatan Tekad Rakyat Timor-Timur*, Jakarta : Yayasan Perikesit, 1976.
- Sofwan, Mardanas.dkk. *Sejarah Kota Padang*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1987)
- Takdir, Ali Mukti. *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013)

Yang Long, Chen Xin, Jiang Liu. *The Characteristics and Functions of International Friendship Cities of China— and Prospects of Local Cooperation in Sino-Poland Relations*. Nankai University.

Dokumen Resmi

Peraturan Daerah Kota Padang No. 10 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) 50/2007

Peraturan Menteri Luar Negeri no. 09/A/KP/ XII/2006/01 Daerah dengan Pihak Luar Negeri; dan Pedoman Pelaksanaan Kerjasama *Sister City/Sister Province*.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (Sister City) dan Antar Provinsi (Sister Province) dalam dan luar negeri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 1 ayat (9).

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Aschari Cahyaditama, Ph.D. Kepala Bagan Biro Kerjasama dan Rantau Provinsi Sumatera Barat

Wawancara dengan Bapak Erwin M, Kepala Bagian Biro Kerjasama Pemerintah Kota Padang pada 10 Januari 2019.

Situs

Bagian Kerjasama Kota Bandung; *Sister City*

<http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city>

City of Fremantle. Visit: Getting Around

<https://www.fremantle.wa.gov.au/>

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Padang.

<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/sumbar/padang.pdf>

Dinobatkan Tamu Kehormatan, Walikota Fremantle Australia Saat Berkunjung Di Kota Padang

<http://www.mediawawasan.com/2017/05/dinobatkan-tamu-kehormatan-walikota.html>

Diaspora Indonesia-Kemendagri tandatangani nota kesepahaman kota

kembar https://makassar.antaranews.com/nasional/berita/732299/diaspora-indonesia-kemendagri-tandatangani-nota-kesepahaman-kota-kembar?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews

https://makassar.antaranews.com/nasional/berita/732299/diaspora-indonesia-kemendagri-tandatangani-nota-kesepahaman-kota-kembar?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews

https://makassar.antaranews.com/nasional/berita/732299/diaspora-indonesia-kemendagri-tandatangani-nota-kesepahaman-kota-kembar?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews

Dubes Kristiarto. Hubungan Indonesia-Australia Naik Kelas

<https://dunia.tempo.co/read/1060591/dubes-kristiartohubungan-indonesia-australia-naik-kelas>

<https://dunia.tempo.co/read/1060591/dubes-kristiartohubungan-indonesia-australia-naik-kelas>

History and Heritage, Fremantle ports (Fremantle port authority)

<https://www.fremantleports.com.au/the-port/history-and-heritage>

<https://www.fremantleports.com.au/the-port/history-and-heritage>

Inilah Hasil Kunjungan Walikota Padang ke Perth Australia

<https://www.bentengsumbar.com/2016/11/inilah-hasil-kunjungan-walikota-padang.html>

<https://www.bentengsumbar.com/2016/11/inilah-hasil-kunjungan-walikota-padang.html>

Kementerian Luar Negeri. *Kebijakan Detail Kerjasama Bilateral*.

<https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=54>

<https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=54>

Kementerian Luar Negeri: Pembentukan *Sister City* Kota Padang Indonesia dengan Kota Fremantle Australia

- <https://kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Pembentukan-Sister-City-Kota-Padang.-Indonesia-Dengan-Kota-Fremantle,-Australia-Barat.aspx>
- KJRI Perth. Courtesy Call Konjen RI Perth dengan Premier Australia Barat, Hon Mark McGowan MLA
<http://kjri-perth.org.au/index.php/2017/04/27/they-are-talking-about-indonesia/>
- Konsep Sister City, “Twins Towns,”
<http://www.amazingduselldorf.com/community-local/people/twins-town.html>
- Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia
<https://www.kemlu.go.id/perth/id/Pages/Australia.aspx>
- Kota Tua Padang Wonderfully, Tapi Maaf Kebersihannya Harus Dibenahi
<https://www.tribunsumbar.com/kota-tua-padang-wonderfully-maaf-masih-kumuh/>
- Pemerintah Kota Padang, “*Sejarah Kota Padang*”.
<https://www.padang.go.id/sejarah-kota-padang>
- Peningkatan Kerjasama Daerah di Indonesia melalui Sister City
<https://indopos.co.id/read/2018/08/02/146006/peningkatan-kerjasama-daerah-di-indonesia-melalui-sister-city>
- Port Facilities, Fremantle ports (Fremantle port authority)
<https://www.fremantleports.com.au/the-port/port-facilities>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: Inilah PP Nomor 28/2018 tentang Kerja Sama Daerah
<https://setkab.go.id/inilah-pp-nomor-282018-tentang-kerja-sama-daerah/>
- Tim Dayung Walikota Menang Selaju Sampan
<http://rri.co.id/padang/post/berita/388505/olahraga/tim-dayung-walikota-menang-selaju-sampan.html>
- Veronika Yasinta, *Australia Kembali Potong Dana Bantuan untuk Indonesia*.
<https://internasional.kompas.com/read/2019/04/03/13224091/australia-kembali-potong-dana-bantuan-untuk-indonesia?page=all>
- Walikota Fremantle Australia Kunjungi Semen Padang
<http://www.semenpadang.co.id/?mod=berita&kat=&id=1451>
<http://tataruang.bpn.go.id/bulletin/upload/datarartikel/edisi3i.pdf>
<https://kemlu.go.id/portal/lc/read/167/halaman-list-lainnya/indian-ocean-rim-association>